

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
JAWA TIMUR**

Kantor Pusat :  
Jalan Ciliwung Nomor 11 Surabaya  
Telp. 031-567784

## 1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM.

### a. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

##### a) Jumlah dan komposisi anggota Direksi

Sesuai dengan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Rosida, SH notaris di Surabaya tanggal 23 Mei 2013 Nomor: 20, maka jumlah anggota Direksi PT. BPR Jatim adalah 5 (lima).

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Jatim telah lulus Fit and Proper Test dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun. Sedangkan untuk periode saat ini sesuai dengan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 nomor 21, akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2018, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2016 Nomor 12, maka susunan anggota Direksi PT. BPR Jatim adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Subawi, SE, MM.	Direktur Utama
2.	Drajat Sunaryadi, SH, MM.	Direktur Umum
3.	Bambang Rushadi, SE, MM	Direktur Pemasaran
4.	Purnomo Hadi Winarto, SE, MM	Direktur Operasional
5.	Sugeng Hariyanto, SE, MM, Ak,CA	Direktur Kepatuhan

##### b) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris.

- Terkait dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2018 sesuai Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 nomor 21, maka Direksi telah menindaklanjuti dengan Surat Direksi Nomor : 058/Dir/2017 tanggal 16 Nopember 2017 tentang Masa Akhir Jabatan Direksi Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur, dan Dewan Komisaris telah menindaklanjuti dengan membuat surat kepada Gubernur nomor 056/Dekom/XII/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal Laporan Penilaian Masa Tugas Direksi.
- Sebagai upaya penyesuaian atas diberlakukannya Permendagri Nomor 94 tahun 2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Direksi telah membentuk Tim

Penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. BPR Jatim yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor : 206.1/KEP/DIR.Um/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Tim Penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

a) Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Akta Pendirian PT. BPR JATIM Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000 dan Nomor 14 tanggal 21 Agustus 2001 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C.15080.HT.01.01.TH.2001 tanggal 05 Desember 2001, maka jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jatim adalah 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, dan 2 (dua) Komisaris.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 Nomor : 22, maka susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jatim adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	DR. H. Rasiyo, Msi	Komisaris Utama
2.	Thonyono Yoso Utomo, SE, MM.	Komisaris
3.	Drs. H. Tri Dharma, MM	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jatim telah lulus Fit and Proper Test dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun. Sedangkan untuk periode saat ini sesuai dengan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 Nomor: 22 akan berakhir pada tanggal 15 April 2019, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

b) Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.

- Sesuai Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 nomor 21, maka seluruh anggota Direksi akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2018, sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah yang konkrit terkait berakhirnya masa jabatan anggota Direksi karena menurut ketentuan yang ada bahwa proses pengajuan calon anggota Direksi oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

- Melakukan penyesuaian beberapa ketentuan yang ada di PT. BPR Jatim terkait dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 94 tahun 2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite

a) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan independensi anggota Komite.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/KEP/Dir.PP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, maka telah dipenuhi Komite-Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor : 057/DEKOM/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur dan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor : 058/DEKOM/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Struktur dan Keanggotaan Komite Audit PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur, sehingga struktur keanggotaan Komite-Komite adalah :

- Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Thonyono Yoso Utomo, SE.MM	Ketua	Komisaris
2.	Drs. H. Tri Dharma, MM	Anggota	Komisaris
3.	Siswoyo Ambali	Anggota	Pihak Independen

- Struktur Keanggotaan Komite Audit.

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. H. Tri Dharma, MM	Ketua	Komisaris
2.	Thonyono Yoso Utomo, SE.MM	Anggota	Komisaris
3.	Isstyo Wibowo	Anggota	Pihak Independen

b) Program kerja Komite dan realisasinya.

Pada tahun 2017 beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- Komite Audit.

Program Kerja Komite Audit 2017

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1.	Laporan Evaluasi SPI Semester I & II 2016	Bulan Januari Minggu I
2.	Rapat dengan SPI Terkait Laporan Semester I & II 2016	Bulan Januari Minggu II
3.	Laporan Evaluasi KAP Pasca Audit	Bulan Juni Minggu III
4.	Laporan SPI Semester I	Bulan Juni Minggu IV
5.	Kajian Pedoman Pengawasan Intern	Bulan Desember Minggu III
6.	Rekomendasi KAP Tahun Buku 2018	Bulan Nopember Minggu II
7.	Laporan Evaluasi KAP Proses Pemeriksaan Cabang 2017	Bulan Desember Minggu II
8.	Laporan Evaluasi SPI Tahun 2017	Bulan Desember Minggu IV

Realisasi Program Kerja Komite Audit 2017

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	Laporan Pemantauan Pelaksanaan Satuan Pengendali Intern Semester 1 & II 2016	03-01-2017
2.	Rapat Gabungan Antara Komite Dewan Komisaris Dengan Divisi Satuan Pengawas Intern	17-01-2017
3.	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi oleh AP/KAP	20-06-2017
4.	Laporan Pemantauan Pelaksanaan Satuan Pengendali Intern Semester 1 2017	12-07-2017
5.	Rapat Gabungan Antara Komite Dewan Komisaris Dengan Divisi Satuan Pengawas Intern Tentang LHP SPI Semester I	13-07-2017
6.	Membuat Rekomendasi Penunjukan KAP Tahun Buku 2017	13-11-2017
7.	Laporan Evaluasi Audit Internal Dan Proses Audit Eksternal 2017	20-12-2017

8.	Membuat Kajian Pedoman Pengawasan Intern yang Dibuat SPI	21-12-2017
----	--	------------

- Komite Pemantau Risiko.

Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2017

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Evaluasi Kinerja Bulanan PT. BPR Jatim	Setiap Bulan
2.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwula I	Bulan Maret
3.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwula II	Bulan Juni
4.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwula III	Bulan September
5.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwula IV	Bulan Desember
6.	Evaluasi Pedoman Tata Tertib Komite	Bulan Maret
7.	Evaluasi Pemberian Tunjangan Pelaksanaan Kepada Pegawai/Staf PT. BPR Jatim	Bulan Pebruari

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2017

NO.	JENIS KEGIATAN	TANGGAL
1.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Januari 2017	03-02-2017
2.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwulan I EVALUASI PROFIL RISIKO TRIWULAN IV 2016	06-02-2017
3.	Kajian Pemberian Tunjangan Pelaksanaan Kepada Staf PT. BPR Jatim	16-02-2017
4.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Pebruari 2017	29-02-2017
5.	Rapat Pembahasan Pedoman Tata Tertib Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	08-03-2017
6.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Maret 2017	24-05-2017
7.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan April 2017	28-05-2017
8.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwulan I EVALUASI PROFIL RISIKO TRIWULAN I 2017	05-06-2017
9.	Kajian Sumber Dan Penggunaan Dana Tanggal 18 Juni 2017 Kebutuhan Likuiditas	28-05-2017

10.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Mei 2017	05-06-2017
11.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Juni 2017	07-06-2017
12.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Juli 2017	24-07-2017
13.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwulan III EVALUASI PROFIL RISIKO TRIWULAN II 2017	06-09-2017
14.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Agustus 2017	25-09-2017
15.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan September 2017	25-10-2017
16.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Oktober 2017	27-11-2017
17.	Rapat Komite Pemantau Risiko Triwulan IV EVALUASI PROFIL RISIKO TRIWULAN III 2017	04-12-2017
18.	Evaluasi Laporan Bulanan Kinerja PT. BPR Jatim Bulan Nopember 2017	29-12-2017

**b. Kepemilikan Saham Direksi.**

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham sebesar 25% atau lebih dari Modal Disetor	
			PT. BPR Jatim	Perusahaan Lain
1.	Subawi, SE, MM	Direktur Utama	-	-
2.	Drajat Sunaryadi, SH, MM.	Direktur	-	-
3.	Bambang Rushadi, SE, MM	Direktur	-	-
4.	Purnomo Hadi Winarto, SE, MM	Direktur	-	-
5.	Sugeng Hariyanto, SE, MM, Ak,CA	Direktur	-	√

**c. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Jatim.**

- 1) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT. BPR Jatim.
- 2) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT. BPR Jatim.

**d. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.**

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT. BPR Jatim, BPR lain dan perusahaan lain.

**e. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Jatim.**

- 1) Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham PT. BPR Jatim.
- 2) Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham PT. BPR Jatim.

**f. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.**

(dalam jutaan rupiah)

NO.	KEBIJAKAN REMUNERASI & FASILITAS	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
		DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Org	Rp.	Org	Rp.
1.	Jumlah Keseluruhan Gaji	5	1.764	3	1.339
2.	Tunjangan	5	3.642	3	-
3.	Tantiem	5	1.533	3	380
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	5	815	3	202
6.	Fasilitas lain	1. Kendaraan Dinas 2. Fasilitas Perawatan Kesehatan		Kendaraan Dinas	

**Keterangan :**

Sesuai Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 nomor 21 bahwa masa jabatan anggota Direksi akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2018.

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 50, Direksi berhak mendapatkan uang pengganti cuti pada setiap akhir masa jabatan yang diterima di tahun 2017 sebesar sebagai berikut :
- Direktur Utama sebesar Rp. 217,5 juta
- Direktur (4 orang) sebesar Rp. 696 juta

**g. Rasio gaji tertinggi dan terendah.**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan



menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

<b>NO.</b>	<b>RASIO</b>	<b>PERBANDINGAN</b>
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	8,01
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,50
5.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4,94

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas, adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT. BPR JATIM sampai bulan Desember 2017.

#### **h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.**

Jumlah rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah 8 (delapan) kali.

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH RAPAT</b>	<b>KEHADIRAN</b>	<b>PROSENTASE</b>
1.	DR. H. Rasiyo, Msi.	8	8	100 %
2.	Thonyono Yoso Utomo, SE, MM	8	8	100 %
3.	Drs. Tri Dharma, MM	8	8	100 %

Jadwal dan materi Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2017 adalah :

<b>NO.</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>MATERI RAPAT</b>
1.	17 Februari 2017	Gaji, Persiapan RUPS 2016 dan Lain-lain
2.	22 Maret 2017	Evaluasi Performance Kinerja Triwulan I 2017
3.	15 Mei 2017	Perpanjangan Kontrak Kerja Komite
4.	07 Juni 2017	Tunjangan Hari Raya
5.	22 September 2017	SK Dekom Terkait Tunjangan Kemahalan Dan Tunjangan Perumahan Kepada Direksi
6.	02 Oktober 2017	Evaluasi Kinerja Realisasi Dan Anggaran RKT 2017
7.	21 Nopember 2017	Menindak Lanjuti Surat Direksi Perihal Masa Akhir Jabatan Direksi
8.	13 Desember 2017	Laporan Menghadiri Undangan OJK Dan Rapat Bersama Asisten & Biro

i. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud					25	13		
Telah Diselesaikan						2		
Dalam proses penyelesaian internal BPR					16	10		
Belum diupayakan penyelesaiannya					-	-		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						1		

j. Permasalahan hukum.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	2
Dalam proses penyelesaian	-	3
Total	-	5

k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Selama tahun 2017, tidak terdapat adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

1) Pemberian Dana untuk kegiatan sosial.

No	Nama Penerima	Jumlah (Ribuan Rupiah)	Tanggal
1	Bantuan Dana Sarasehan Keluarga Besar Marhaenis Dewan Pimpinan Prov Jatim	Rp 5.000	03-01-2017
2	Bantuan Dana Disabilitas DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Prov. Jatim	Rp 250	03-02-2017
3	Gelar Seni Budaya oleh Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jatim	Rp 3.500	13-02-2017

4	Ekonomi Event Univ. Wijaya Kusuma Fakultas Ekonomi	Rp	500	13-02-2017
5	Seminar dan Dialog LSM Merah Putih	Rp	250	06-03-2017
6	Seminar Nasional Keluarga alumni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Rp	2.000	15-03-2017
7	Dana Safari Sembako, Sunatan Masal, Pengobatan Gratis dan Donor Darah Panitia ASW Jalin Kasih Yayasan Ponpes "Anlus Shofa Wal Wafa"	Rp	500	15-03-2017
8	Peringatan Hari Kartini PEPABRI Ranting Khusus Hang Tuah Surabaya	Rp	500	16-03-2017
9	Partisipasi HUT Satpol PP	Rp	2.500	17-03-2017
10	Pembangunan Mushola Yayasan Assalam	Rp	1.000	22-03-2017
11	Sponsorship zakat, hibah PPPA Darul Quran	Rp	1.000	26-03-2017
12	HUT ke – 3 Koran Metro	Rp	500	31-03-2017
13	Pengadaan pohon kayu - kayuan dan pohon produksi untuk LBH Gepalhi	Rp	250	03-04-2017
14	Perbamida Peduli Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo	Rp	5.000	04-04-2017
15	Partisipasi Pagelaran Budaya KWRI Surabaya (Komite Wartawan Reformasi Indonesia)	Rp	500	13-04-2017
16	Buka Puasa dan Bakti Sosial BPHC Korps Cacad Veteran RI Surabaya - IPPTN RI	Rp	250	25-04-2017
17	Tali Asih Pelajar Tuna Netra dan Kurang Mampu Surat Kabar "Bidik Nasional"	Rp	1.000	25-04-2017
18	Partisipasi Hari Anak Nasional SLB BC Optimal	Rp	500	25-04-2017
19	Partisipasi Bakti Sosial Panti Asuhan Muhammadiyah Putat Jaya	Rp	500	25-04-2017
20	Panitia Isro Miraj Perum Sedati Permai	Rp	500	27-04-2017
21	Bantuan Fasilitas Peringatan May Day Th 2017 Sekda Prov. Jatim	Rp	2.000	02-05-2017

22	Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (Kegiatan Khitanan Masal)	Rp	500	15-05-2017
23	Seminar Tentang Perbankan bagi Disabilitas oleh Persatuan Tuna Netra Indonesia	Rp	10.000	16-05-2017
24	Kegiatan Buka Bersama Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia	Rp	500	23-05-2017
25	Donasi Buka Bersama Pengurus Pesarehan Ki Ageng Sunan Bungkul	Rp	250	31-05-2017
26	LKSA Pakis Sejahtera (Santunan Ramadhan)	Rp	250	31-05-2017
27	Panti asuhan Baitul Nur (Bantuan Buka Bersama)	Rp	250	31-05-2017
28	Yayasan Al Ikhlas Surabaya (Bantuan Buka Bersama)	Rp	250	31-05-2017
29	LSM GE AKI JATIM (Bantuan Buka Bersama)	Rp	250	05-06-2017
30	Surat Kabar Nasional Investigasi (Partisipasi Baksos dan Buber)	Rp	250	05-06-2017
31	Lambadas (Takjil/Zakat Fitra/Maal)	Rp	500	05-06-2017
32	YPPLU (Permohonan ZIS (Zakat, Infak, Shodakoh)	Rp	250	08-06-2017
33	Agus Samiadji (dana CSR Sepeda)	Rp	500	09-06-2017
34	Yayasan Wijaya Kusuma (Peran Serta berbagi acara Buka Puasa)	Rp	1.000	12-06-2017
35	Bantuan Kegiatan Temu Alumni Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Jember	Rp	3.000	13-06-2017
36	BKKKS (Bantuan Hari Anak Nasional 2017)	Rp	2.500	13-07-2017
37	Yayasan Rahmatul Anwar (Donasi Kegiatan Wisuda Santri TPQ 2017)	Rp	500	10-08-2017
38	Kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional 2017 Dinas Sosial Prov. Jatim	Rp	500	14-08-2017
39	Amal Bakti Pahlawan FKLJKD Jatim	Rp	4.000	28-08-2017
40	Permohonan partisipasi sponsorship 1 Muharam Tahun Baru Islam oleh Sekda Prov. Jatim	Rp	1.000	30-08-2017
41	YPPLU (Tali Asih)	Rp	500	07-09-2017

42	BPHC Korps Cacat Veteran (Sponsorship Hari Pahlawan)	Rp	250	14-09-2017
43	Permohonan bantuan BakSos Penderita Kusta BKOW Prov Jawa Timur	Rp	5.000	20-09-2017
44	Pembangunan perluasan masjid Nurul Iman Panitia Masjid Nurul Iman	Rp	1.000	20-09-2017
45	Sekda Prov Jatim (Baksos Hari Jadi Prov. Jatim)	Rp	15.000	02-10-2017
46	Peduli Sosial FKPCTI (Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia)	Rp	375	16-10-2017
47	Gelar Seni Budaya dan Pariwisata P. Bawean oleh Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jatim	Rp	1.000	18-10-2017
48	Partisipasi Hari Disabilitas Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia	Rp	300	02-11-2017
49	Bantuan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2017 BKKKS	Rp	1.000	10-11-2017
50	Partisipasi Bakti Sosial GEPENTA JATIM	Rp	300	21-11-2017
51	Bantuan Hari Kesetiawanan Sosial Nasional (HKSNN) Dinas Sosial Prov. Jatim	Rp	500	21-11-2017
52	Yayasan Rahmatul Anwar (Donasi Gebyar Maulid Nabi 2017)	Rp	5.000	06-12-2017
53	Lambadas (Pengajian Akbar)	Rp	300	13-12-2017
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>84.275</b>	

Selama tahun 2017, PT. BPR JATIM tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

## 2. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola PT. BPR Jatim pada bulan Desember 2017 adalah :

<b>Faktor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>Nilai Komposit</b>
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.20	0.13	0.03	0.10	0.10	0.15	0.03	0.24	0.14	0.14	0.08	<b>1.33</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Sangat Baik</b>											

### Kesimpulan :

- a) Faktor 1 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.  
Jumlah anggota Direksi PT. BPR Jatim 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi dapat berfungsi dengan baik, namun demikian sesuai dengan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2014 tanggal 27 Februari 2014 nomor 21, maka seluruh anggota Direksi akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2018, sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah yang konkrit terkait berakhirnya masa jabatan anggota Direksi karena menurut ketentuan yang ada bahwa proses pengajuan calon anggota Direksi oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- b) Faktor 2 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.  
Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Jatim 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris sebagai Komisaris Independen, namun demikian perlu dilakukan penunjukan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Faktor 3 : Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite.  
PT. BPR Jatim telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang mayoritas berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sehingga perannya diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang cukup atas pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d) Faktor 4 : Penanganan benturan kepentingan.  
PT. BPR Jatim telah melakukan penanganan benturan kepentingan, namun demikian belum terdapat ketentuan yang tertulis tentang penanganan benturan kepentingan sehingga penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan selama ini masih perlu dilakukan evaluasi.

- e) Faktor 5 : Penerapan fungsi kepatuhan.  
PT. BPR Jatim telah memiliki Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun demikian dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan di setiap Unit Kerja agar dibentuk pegawai yang mewakili Divisi Kepatuhan sehingga pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing Unit Kerja dapat berjalan dengan efektif.
- f) Faktor 6 : Penerapan fungsi audit intern.  
Divisi Pengawas Intern di PT. BPR Jatim telah berfungsi sebagai Satuan Kerja Audit Intern yang melaksanakan penerapan fungsi audit intern, namun demikian keberadaan Divisi Pengawas Intern sebagai Satuan Kerja Audit Intern perlu ditunjang dengan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia-nya yang handal untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan POJK tentang Tata Kelola BPR.
- g) Faktor 7 : Penerapan fungsi audit ekstern.  
PT. BPR Jatim telah melakukan audit ekstern, namun demikian agar didalam hasil audit intern dapat menggambarkan dengan jelas atas permasalahan yang ada sehingga akan menjadi perhatian manajemen dalam melaksanakan kebijakan di tahun yang akan datang.
- h) Faktor 8 : Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.  
PT. BPR Jatim telah mempunyai Pedoman Pengendalian Risiko yang mencakup unsur-unsur yang ada dalam Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan POJK tentang Manajemen Risiko BPR, namun demikian Pedoman Pengendalian Risiko tersebut masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan POJK tentang Manajemen Risiko BPR yang sampai dengan saat ini masih menunggu keluarnya Surat Edaran OJK yang mengatur tentang pelaksanaan Manajemen Risiko.
- i) Faktor 9 : Batas maksimum pemberian kredit.  
PT. BPR Jatim telah mempunyai pedoman tertulis tentang BMPK yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank, namun demikian dalam proses pemberian kredit dengan large exposure masih kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga berdampak pada tingginya NPL diatas 5%.
- j) Faktor 10 : Rencana bisnis BPR.  
PT. BPR Jatim telah menyusun Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun demikian terhadap Rencana Bisnis tersebut perlu dilakukan monitoring secara ketat terhadap realisasi pelaksanaan Rencana Bisnis tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Rencana Bisnis tersebut dapat berjalan secara efektif.

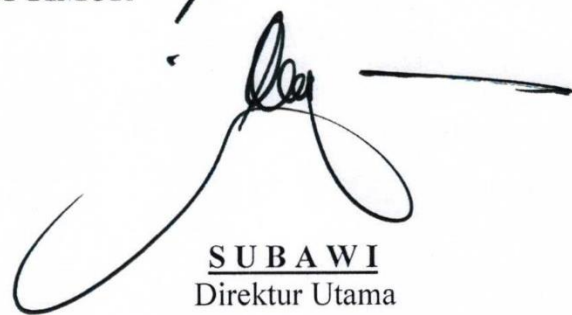
- k) Faktor 11 : Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.  
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan di PT. BPR Jatim telah dilakukan, namun demikian perlu adanya sistem tehnologi informasi yang dapat menunjang laporan keuangan secara cepat, akurat dan memadai serta perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan laporan keuangan dan non keuangan sehingga mampu menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh dan dapat dipercaya oleh pemakai laporan keuangan / non keuangan.

Surabaya, 7 Februari 2018

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
JAWA TIMUR**



**DR. RASIYO, MSi**  
Komisaris Utama



**SUBAWI**  
Direktur Utama